

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi sarana dan prasarana negara. Dengan adanya pajak, perekonomian dapat stabil dan terciptanya segala fasilitas publik yang memadai mulai dari sarana umum, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, terciptanya transportasi publik dll.

Di era seperti sekarang ini, perkembangan teknologi semakin pesat dan semakin baik dari sebelumnya. Berbagai strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem pemerintahan dengan teknologi semakin dikedepankan demi birokrasi yang lebih baik dan tertata. Beberapa bidang pemerintahan di Indonesia telah menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya, contohnya adalah Bidang Kependudukan yang menggunakan sistem Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) yang terintegrasi, lalu di Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan *e-budgeting* (Perencanaan Anggaran dengan sistem informasi). Manfaat dalam penerapan teknologi informasi tersebut adalah efisiensi dan mengurangi biaya operasional dan juga dapat menerapkan pelayanan yang baik kepada pengguna.

Sejak Tahun 2015 yang lalu, Pemerintah Indonesia sedang mengejar target penerimaan pajak masyarakat yang seharusnya memenuhi kewajibannya. Segala bentuk kemudahan ditawarkan

Pemerintah agar dapat menarik Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudahan tersebut mulai dari kerjasama antara bank-bank swasta di Indonesia agar dapat menerima pembayaran pajak yang dulunya hanya kantor pos saja sebagai satu-satunya *channel* yang dapat menerima pembayaran pajak, lalu sistem pembayaran pajak dengan sistem *online* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) sehingga tidak perlu lagi melakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual. SSE ini dapat diisi / dibuat di website [sse.pajak.go.id](http://sse.pajak.go.id) yang lebih dikenal sebagai *e-billing* Pajak versi 1. Tetapi dalam perkembangannya *e-billing* pajak versi 1 terdapat kelemahan, seperti tidak terintegrasinya dengan halaman DJP Online, 1 *email* dapat digunakan berkali-kali untuk membuat akun yang berbeda, lalu tidak adanya kode pengenalan khusus bagi WP yang ingin mendaftar.

Melihat masih terdapat kelemahan di *e-billing* pajak versi 1, Direktorat Jenderal Pajak berinovasi dengan meluncurkan *e-billing* pajak versi 2 yang dinilai lebih baik dari generasi sebelumnya. Kelebihan *e-billing* pajak versi 2 dapat menjawab segala kelemahan di *e-billing* pajak versi 1, yaitu sudah terintegrasi dengan DJP Online, 1 *email* hanya dapat digunakan 1 akun (WP yang bersangkutan), lalu adanya E-FIN atau *Electronic Filling Identification Number*. E-FIN sendiri adalah kode pengenalan unik yang diberikan DJP berbeda-beda

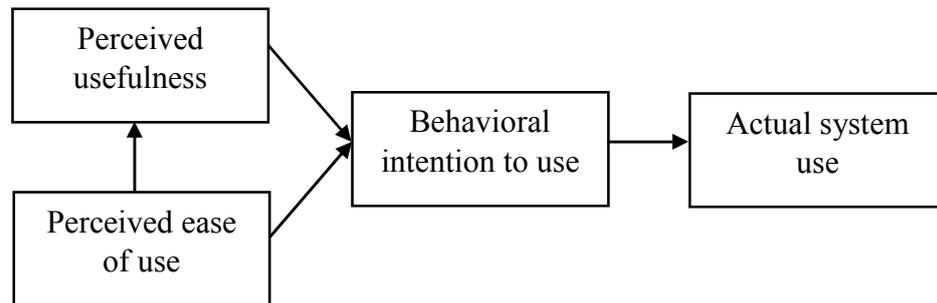
setiap WP yang harus diperlukan pada saat membuat akun *e-billing* pajak versi 2, apabila tidak menggunakan E-FIN maka tidak dapat masuk ke *e-billing* pajak versi 2.

Faktanya seperti dilansir dari situs liputan6.com realisasi penerimaan pajak 2016 hanya mencapai 85%, dan itupun dikarenakan adanya prgram *Tax Amnesty* di tahun 2016. Sebelumnya, pada bulan Oktober hanya 64,2% realisasinya. Meskipun sudah diberlakukannya sistem *e-billing* pajak versi 2 tetapi kurang bisa meningkatkan kesadaran pembayaran pajak di Indonesia.

Maka dari itu, penelitian akan berfokus pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan sistem *e-billing* pajak versi 2 sebagai sarana dalam pemenuhan kewajiban WP orang pribadi.

Penelitian mengenai topik teknologi dan sistem informasi banyak menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dicetuskan oleh Davis et. al pada tahun 1989. Model TAM pada dasarnya merupakan penjelasan hubungan antara persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan persepsi kemudahan (*Perceived ease of use*) terhadap niat untuk menggunakan (*behavioral intention to use*) sebuah sistem dan penggunaan nyata (*actual system use*).

Gambar 1.1

Diagram *Technology Acceptance Model*

Sumber : Davis et. al. (1989), Venkatesh et. al. (2003)

Diagram tersebut menjelaskan hubungan antar konstruk dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), yaitu persepsi kemudahan dalam penggunaan sebuah sistem (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) sistem tersebut. Selanjutnya persepsi-persepsi tersebut sama-sama berpengaruh terhadap keinginan / niat untuk menggunakan (*behavioral intention to use*) yang berpengaruh pada pemakaian nyata (*actual system use*) pengguna. Penelitian ini merupakan replikasi dari model TAM yang dikembangkan oleh Davis et. al. pada tahun 1989, Venkatesh et. al pada tahun 2003.

Dengan berdasarkan replikasi model TAM, penelitian ini akan mencari tahu pengaruh faktor persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan dalam penggunaan terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada sistem *e-billing* pajak versi 2 di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini berjudul “**Pengaruh *Perceived Usefulness* dan**

***Perceived ease of use* terhadap Keinginan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Menggunakan *e-billing* Pajak Versi 2”**

**1.2 Perumusan dan Batasan Masalah**

Terobosan-terobosan baru dalam bidang teknologi terus dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak di Indonesia. Dengan dirilisnya *e-billing* pertama pada tahun 2015, sudah jadi contoh nyata DJP untuk terus berkembang lebih baik lagi. Pada tahun 2016 lalu, DJP menyempurnakan lagi sistem *e-billing* dengan merilis versi ke-2 agar semakin meningkatkan pelayanan, kecepatan, dan efisiensi dalam tata cara pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keinginan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menggunakan *e-billing* pajak versi 2. Sehingga dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *perceived usefulness e-billing* pajak versi 2 berpengaruh positif terhadap Keinginan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Menggunakan *e-billing* pajak versi 2 ?
2. Apakah *perceived ease of use e-billing* pajak versi 2 berpengaruh positif terhadap Keinginan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Menggunakan *e-billing* pajak versi 2 ?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *perceived usefulness e-billing* pajak versi 2 terhadap keinginan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menggunakan *e-billing* pajak versi 2.
2. Untuk mengetahui pengaruh *perceived ease of use e-billing* pajak versi 2 terhadap keinginan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menggunakan *e-billing* pajak versi 2.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

#### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan sebagai gambaran yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini.

#### 2. BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijabarkan teori-teori serta literasi yang menjadi acuan dan landasan yang digunakan dalam pengembangan hipotesis serta pedoman di dalam penelitian ini.

### 3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan langsung dengan penelitian seperti populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

### 4. BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dan analisis data berupa perhitungan statistik dan analisa untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

### 5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan akhir dari hasil analisis data serta saran-saran dari peneliti.

